

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecurangan laporan keuangan telah muncul dan berkembang diberbagai Negara, termasuk di Indonesia. Kecurangan atau *Fraud* yang akhir-akhir ini sudah menjadi momok tersendiri pada sektor publik atau pemerintah telah mendapat banyak perhatian, bahkan di Indonesia kecurangan sudah menjadi kebiasaan dari tahun ketahun, kecurangan tidak hanya melibatkan orang-orang yang mempunyai jabatan tinggi tetapi juga melibatkan orang-orang yang berada dibawahnya, serta tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintah pusat melainkan juga terjadi dilingkungan daerah, pada umumnya kecurangan berkaitan dengan korupsi. Di samping itu, kecurangan (*fraud*) dapat kita lihat dari penyajian laporan keuangan, Jika laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi, kelalaian atau kesengajaan ini seperti memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen sehingga dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan dan dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara.

Kecurangan laporan keuangan pada dasarnya adalah salah saji yang timbul atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, Salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya yang berakibat Laporan Keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Kecurangan ini bentuk penipuan yang sengaja dilakukan sehingga dapat menimbulkan kerugian

tanpa disadari oleh pihak yang dirugikan tersebut dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Hal ini sesuai dengan pendapat Arens (2008) dalam bukunya yang menyatakan bahwa kecurangan adalah setiap upaya penipuan yang disengaja, yang dimaksudkan untuk mengambil harta atau hak orang atau pihak lain demi menguntungkan kepentingan pribadi.

Pemerintah dituntut melaksanakan tugasnya untuk memastikan bahwa keuangan Negara dikelola dengan baik dan accountable, agar laporan keuangan benar-benar memiliki manfaat dan memberikan informasi untuk pengambilan keputusan tersebut yaitu laporan keuangan yang dalam penyajiannya mengandung ketepatan dan kewajaran nilai, menyatakan keadaan yang sesungguhnya, tidak dimanipulasi atau disajikan secara jujur. Menurut Wahyuni (2017) menjelaskan bahwa Kecurangan laporan keuangan bagian dari perilaku yang disengaja untuk menghasilkan laporan keuangan yang salah secara material, Kecurangan dalam laporan keuangan merupakan hal yang sangat fatal, disamping itu Laporan keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban haruslah disajikan dengan andal dan relevan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut tidak dirugikan. Prinsip yang berlaku umum di Indonesia merupakan landasan atau pedoman yang di pakai atau di gunakan oleh pemerintah untuk pertanggung jawaban public kepada masyarakat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang diganti dengan (PP) No. 71 tahun 2010 merupakan pedoman bagi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan

serta menghindari terjadinya perbedaan persepsi dan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai penyaji laporan keuangan dengan pengguna laporan keuangan. Karena laporan keuangan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka laporan keuangan pemerintah harus disajikan secara relevan dan reliabel serta perlu pengungkapan yang memadai mengenai informasi-informasi yang dapat mempengaruhi keputusan.

Sesuai Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan keuangan dan tanggung jawab keuangan Negara pemeriksaan keuangan meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh yang BPK dalam rangka memberikan opini tentang tingkat kejawaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, dalam fenomena yang terjadi di kota Palopo, BPK telah melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan, dapat kita lihat bahwa berdasarkan hasil badan pemeriksaan keuangan (BPK) dikota palopo selama empat tahun berturut-turut yakni sejak tahun 2015 hingga tahun 2018 kembali berhasil meraih penilaian yang sangat baik terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). (sindonews.com), Namun menteri keuangan Sri Mulyani mendorong seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk tidak cepat puas dengan raihan predikat WTP. Hal ini didukung dengan yang dilansir dari tempo.com bahwa pemerintah provinsi Banten menerima opini WTP, tetapi masih menemukan kelemahan mengenai sistem pengendalian internal. Kelemahan lainnya disebabkan oleh masih adanya auditor yang tidak kompeten dalam melaksanakan tugasnya hal ini sesuai dengan

kasus yang terdapat di tempo.com yang mengatakan bahwa opini bisa berubah dari WTP ke disclaimer karena kesalahan auditor yang tidak kompeten, dalam hal ini pihak auditor yang bertugas sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP). Sehingga diperlukan peningkatan kompetensi auditor dalam meningkatkan kinerjanya agar lebih produktif dan diharapkan menjadi auditor yang kompeten dalam audit, revidi, evaluasi, dan monitoring sistem pengendalian internal seluruh organisasi perangkat daerah dan mereview laporan keuangan pemerintah sebelum diserahkan ke BPK.

Setiap orang atau kelompok dalam melakukan sebuah kecurangan, memiliki motivasi yang beragam, yang dimana sebab perilakunya melakukan sebuah kecurangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Cressey (1953) dalam teori *Fraud Triangle* penyebab seseorang melakukan kecurangan disebabkan oleh 3 faktor, yakni faktor kesempatan, tekanan, dan pembenaran. Secara umum penyebab seseorang melakukan kecurangan dikarenakan adanya kesempatan atau peluang. Dalam konteks ini, kecenderungan terjadinya kecurangan disebabkan oleh adanya kesempatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu. Peluang yang terbuka membuat kesempatan untuk melakukan kecurangan semakin besar. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut dalam aspek pemerintahan perlu adanya *monitoring* atau pengawasan yang berskala besar didukung juga dengan sistem pengendalian internal yang baik, sehingga dengan terjaganya hal tersebut maka motivasi untuk melakukan kecurangan yang didasari karena adanya kesempatan akan berkurang.

Menurut (Tunggal 2011:3) pengendalian internal merupakan keseluruhan aktivitas dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk mengawasi dan mengontrol jalannya aktivitas operasional organisasi secara efektif dan efisien. Sistem pengendalian internal yang baik dapat mendukung pertumbuhan perusahaan dalam menghadapi persaingan global. Pengendalian internal yang baik tentu akan mengurangi terjadinya penyelewengan atau kecurangan yang terjadi, sebaliknya jika pengendalian internal buruk maka kecenderungan akan kecurangan akan semakin tinggi Tiro (2014). Pengendalian internal yang diterapkan secara efektif yang kemudian didukung oleh regulasi yang memadai akan mencegah terjadinya ketidakwajaran dan salah saji material bagi pihak yang berkepentingan. Untuk itu, dalam menangani masalah kecurangan diperlukan adanya suatu sistem pengendalian internal yang efektif, yang mampu untuk mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan materiil disuatu instansi. Adanya pengendalian dan pengawasan yang baik terhadap pekerjaan seseorang akan diawasi secara ketat yang didukung dengan pengecekan silang (*cross check*). Dengan demikian, hal tersebut dapat menurunkan adanya kesempatan atau peluang terjadinya kecurangan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Dalam pengendalian internal mempunyai lima elemen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Pengendalian tersebut dilakukan oleh pengawasan intern pemerintah (APIP), yaitu badan pengawasan

keuangan dan pembangunan (BPKP); Inspektorat jendral; inspektorat provinsi; dan inspektorat kabupaten/kota. Pada lingkungan pemerintah daerah, Inspektorat daerah menjadi garda terdepan dalam mencegah maupun menanggulangi terjadinya praktik Kecurangan.

Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. PER/05/PAN/03/2008 menyatakan bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, sesuai rencana, kebijakan yang telah ditetapkan dengan ketentuan. Di samping itu Pemerintah mendorong terjuwudnya good governance dan mendukung penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dari bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pengawasan intern dilingkungan pemerintah kota untuk kepentingan gubernur/bupati/walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kepemimpinannya. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat baik provinsi maupun kota saat ini adalah mereview laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur/ Bupati/ Walikota kepada pihak pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11, dengan adanya pemantauan dari inspektorat akan menghasilkan laporan keuangan yang baik, efektif, dan efisien.

Disamping itu, terkait dengan kompetensi yang harus dimiliki auditor inspektorat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan pada laporan keuangan. Kompetensi adalah sebuah hubungan cara-cara setiap auditor memanfaatkan pengetahuan, keahlian. Yang menjadi tolak ukur seorang auditor dalam mendeteksi kecurangan adalah kompetensi yang dimilikinya. Seorang auditor dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan kompetensi atau kemampuan yang ada di dalam dirinya melalui mutu personal, pengetahuan umum dan *skill* khusus yang cukup, sehingga dapat dikatakan semakin baik tingkat kompetensi seseorang maka tindak kecurangan berkurang. Menurut Trinanda (2016) dalam mendeteksi kecurangan harus didukung oleh kompetensi yang memadai, sehingga setiap kemungkinan kecurangan yang akan terjadi dapat dengan cepat dicegah dan dihindari, disebabkan dengan adanya kompetensi kepekaan terhadap kecurangan akan lebih tajam untuk memprediksi segala bentuk penyimpangan yang akan terjadi. Oleh karena itu kompetensi menjadi sebuah faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecurangan, sedangkan Menurut Wirakusuma & Setiawan, (2019) Kompetensi yang rendah juga akan mengakibatkan kegagalan dalam audit karena auditor akan kesulitan dalam menemukan temuan – temuan yang berkenaan dengan terjadinya penyimpangan, Kompetensi adalah bagian kepribadian yang mendalam dan melekat kepada seseorang serta perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan.

Mengacu pada beberapa yang mengkaji tentang pengaruh pengendalian internal dan kompetensi auditor terhadap kecenderungan kecurangan laporan

keuangan pemerintah daerah menghasilkan temuan yang berbeda atau adanya Gap hasil penelitian diantaranya yang dilakukan oleh Widyaningsih, (2015) Pengaruh Sistem Pengendalian Intern(X1) Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(Y) memiliki hasil penelitian bahwa pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan, Sedangkan dalam penelitian Nurhayati dan Muniarty, (2018) menemukan Hasil penelitian menunjukkan sistem pengendalian internal(X1) mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi(Y). sedangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haikal, (2017) kompetensi(X2) berpengaruh signifikan terhadap pendeteksian *Fraud*(Y) dan sedangkan penelitian menurut Siregar & Hamdani, (2018) kompetensi(X2) tidak berpengaruh terhadap fraud(Y).

Berdasarkan fenomena dan adanya perbedaan hasil penelitian (gap) yang telah di uraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pengaruh Pengendalian Internal dan Komptensi Auditor terhadap Kecendrungan Kecurangan Laporan Keuangan”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini :

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah komepetensi auditor berpengaruh terhadap kecednrungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah di uraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

2. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi auditor terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Auditor Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kantor Inspektorat Luwu raya), hasil ini dapat diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun Manfaat dilakukannya penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat teoritik

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengaruh pengendalian internal dan kompetensi auditor terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah.

1.4.2 Manfaat praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini dapat digunakan peneliti untuk menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang pengendalian internal dan kompetensi auditor terhadap kecenderungan *Fraud* laporan keuangan pemerintah daerah

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah hasil wawasan kepada masyarakat agar dapat mengetahui laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pertanggungjawaban yang disajikan dari pemerintah kepada public.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas dan menyimpang dalam penelitian sehingga lebih bisa terfokus untuk dilakukan. Adapun ruang lingkup dan batasan penelitian adalah yaitu Pengaruh Pengendalian Internal dan Kompetensi Auditor Terhadap Kecendrungan Kecurangan Laporan keuangan pemerintah Daerah.

Variabel dalam penelitian ini yaitu Pengendalian internal dan kompetensi auditor terhadap kecendrungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah. Pengendalian internal adalah suatu proses dalam organisasi guna untuk mencapai tujuan, kompetensi auditor dalam hal ini adalah kemampuan yang harus dimiliki seorang auditor dalam mereview system pengendalian internal instansi/organisasi dan mereview laporan keuangan pemerintah guna untuk melihat apakah didalamnya ada indikasi kecurangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider tahun 1958. Heider mengemukakan bahwa teori atribusi merupakan proses persepsi dan sebagai penelitian kausalitas. Dalam definisi formalnya, atribusi merupakan tindakan untuk menafsirkan berbagai kejadian dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan pemikiran dan perilaku oleh setiap individu. Menurut (Suartana, 2010:181) mengemukakan teori atribusi adalah proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, mempelajari bagaimana seseorang menginterpretasikan alasan atau sebab perilakunya.

Menurut (Robbins et all., 2014:177) mengemukakan bahwa ketika mengobservasikan perilaku tersebut disebabkan secara internal dan eksternal. Perilaku secara internal adalah perilaku yang berasal dalam diri seseorang atau individu. Sedangkan perilaku secara eksternal adalah perilaku yang terdapat dari luar pribadi seseorang seperti tindakan yang dilakukan disebabkan oleh situasi dan keadaan. Sehingga, dalam penelitian ini, dipengaruhi faktor dari dalam seperti kompetensi dan faktor dari luar yakni pengendalian internal organisasi.

2.2 Pengendalian Internal

2.2.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandala pelaporan keuangan, pengamanan terhadap asset, dan ketaan/kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Anis (2013) pengendalian internal merupakan suatu proses akan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pihak atasan dan pegawai yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan organisasi melalui aktivitas yang efektif dan efisien dan taat terhadap peraturan undang-undang yang telah ditetapkan.

System pengendalian internal yang baik, dipengaruhi oleh SDM yang memadai, untuk itu perlu adanya upaya untuk mengembangkan kemampuan dan *skill* yang dimiliki dalam mencapai tujuan dari pengendalian internal yang baik, sehingga dalam pengembangan dan penerapannya perlu dilakukan secara komprehensif dan harus memperhatikan aspek biaya manfaat (*cost and benefit*), rasa keadilan dan kepatuhan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan Menurut Muna & Harris, (2018) menjelaskan pengendalian internal sebagai kebijakan atau prosedur dengan tujuan untuk mengurangi kerugian-kerugian atas terjadinya ancaman keamanan dalam berbagai bentuk informasi. Menurut Mulyadi (2008:180) pengendalian internal merupakan proses atau tindakan yang dijalankan oleh pihak yang berkepentingan, yang diatur dalam rangka untuk memberikan keyakinan memadai tentang tujuan telah ditetapkan yaitu keandalan, kepatuhan, serta efektifitas dan efisiensi operasi.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu sistem yang terdiri dari kebijakan, prosedur, cara, dan peraturan yang ditetapkan oleh sebuah organisasi agar rencana dan tujuan dapat dicapai dengan baik. Dengan adanya pengendalian internal yang efektif akan menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan penyimpangan yang dapat merugikan.

2.2.2 Tujuan pengendalian internal

Menurut Mahmudi (2019) adapun tujuan pengendalian internal yaitu, melindungi aset Negara, pemeliharaan catatan operasional, output lapran keuangan yang relevan dan andal, laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang berlaku, efektivitas dan efesiensi dan untuk ditaati kebijakan manajemen dan undang-undang yang berlaku.

2.2.3 Komponen pengendalian internal

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2006 tentang pengendalian internal dijelaskan bahwa pengendalian internal diselenggarakan secara menyeluruh dilingkungan pemerintah pusat maupun dan daerah. Berkaitan dengan hal ini, presiden selaku pemerintah mengatur dan menyelenggarakan system pengendalian intern dilingkungan pemerintah secara menyeluruh. Menurut Anis (2013) Unsur-unsur pengendalian intern yaitu: (1) Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern, (2) Penilaian resiko, aktivitas penilaian atas kemungkinan keterjadian yang dapat mengancam pencapaian tugas suatu instansi pemerintahan, (3) Kegiatan Pengendalian, merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi

terjadinya resiko terhadap pelaksanaan kebijakan dan pedoman yang telah ditetapkan, (4) Informasi dan Komunikasi, merupakan data yang dapat digunakan untuk mengambil sebuah keputusan dengan tujuan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, (5) Pemantauan, merupakan untuk memastikan apakah semua aktivitas instansi pemerintah sudah sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

2.3 Kompetensi Auditor

2.3.1 Pengertian kompetensi auditor

Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku, dihayati, dan dikuasai dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Menurut Sawyer at. al., (2005: 17), dalam Nugrahni,(2015) Kompetensi Auditor Internal adalah sebuah hubungan cara-cara setiap auditor memanfaatkan pengetahuan, keahlian dan pengalaman. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu (Arens dkk., 2008:5) dalam Lauw Tjun Tjun dkk. (2017). Agar dapat memberikan layanan audit yang berkualitas, auditor harus memiliki dan mempertahankan kompetensi dan ketekunan. Menurut Rahmadi murwanto dkk, (2005) auditor harus selalu meningkatkan pengetahuan dan keahlian profesinya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa instansi tempat ia bekerja atau auditan dapat menerima manfaat dari layanan profesinya berdasarkan pengembangan praktik, ketentuan, dan teknik-teknik yang terbaru. Berdasarkan prinsip dasar ini, auditor hanya dapat

melakukan suatu audit apabila ia memiliki kompetensi yang diperlukan atau menggunakan bantuan tenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara memuaskan. kompetensi auditor adalah kualifikasi yang dibutuhkan oleh auditor untuk melaksanakan audit kinerja dengan benar Pintasari (2015). Jadi dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Auditor Internal mempunyai peranan penting dalam mencegah kecurangan.

2.3.2 Macam-macam Kompetensi Auditor

Menurut Ika Sukriya (2014) ada tiga indikator kompetensi yakni, mutu personal, pengetahuan dan keahlian khusus.

a. Mutu personal

Auditor harus memiliki rasa ingin tahu yang besar, berpikiran luas dan mampu menangani ketidakpastian dan dapat menerima bahwa tidak ada solusi yang mudah serta menyadari bahwa beberapa temuan audit bersifat subyektif. Untuk mendapatkan mutu personal yang baik auditor juga harus menerapkan kerja sama team yang baik dalam melakukan pemeriksaan.

b. Pengetahuan umum

Dalam melakukan pemeriksaa pengetahuan umum sangat penting oleh oleh karena itu auditor harus memiliki ipengethuan tentang bagaimana seorang auditor mendeteksi suatu kecurangan. Selain itu auditor juga harus memiliki pengetahuan tentang organisasi, sector public, dan paling penting adalah pengetahuan akuntansi untuk memudahkan pemeriksaan.

c. Keahlian khusus

Keahlian khusus yang dimaksud disini salah satunya adalah keahlian profesional yaitu tingkat kemahiran profesional auditor dalam melakukan pemeriksaan yang dilaksanakan dengan keterampilan dan kecermatan profesionalnya terhadap penerapan struktur pengendalian. Elemen- elemen dari keahlian profesional ini adalah ketaatan terhadap kode etik profesional, pengetahuan, ketrampilan, dan disiplin ilmu, hubungan dan komunikasi antar manusia, dan pendidikan berkelanjutan (Grefita, 2011) dalam (Wayan Ramantha, 2013). Selain itu auditor juga harus memiliki keahlian dalam menrapkan standar audit internal, prosedur, dan tehnik dalam melakukan penugasan dan keahlian dalam prinsip-prinsip dan tehnik, bagi auditor yang melakukn audit atas pencatatatn dan peloporan keuangan.

2.4 Kecendrungan *Fraud* Laporan Keuangan

2.4.1. Pengertian kecurangan laporan keuangan

Menurut Anis (2013) kecurangan laporan keuangan dapat didefinisikan suatu perilaku yang disengaja, baik dengan tindakan atau penghapusan, yang menyesatkan (bias). Menurut Ikatan Akutansi Indonesia (IAI) (2001) dalam Wilopo (2006), menjelaskan dalam menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan, salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aset (seringkali disebut penyalahgunaan

atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aset entitas yang berkaitan laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) No.16, kecurangan (*Fraud*) dijelaskan dengan istilah kejanggalaan/ketidakteraturan (*irregularities*). pernyataan tersebut, *irregularities* menunjukkan pendistorsian secara sengaja terhadap laporan keuangan seperti pemalsuan, manipulasi atau perubahan terhadap pencatatan akuntansi.

Komisi Nasional mengenai Kecurangan dalam Pelaporan Keuangan (*National Commission on Fraud ulent Financial Reporting*) dalam Henzani (2013) kecurangan pelaporan keuangan merupakan tidnakan yang disengaja yang kemudian menghasilkan laporan keuangan yang tidak sehat. Pelaporan semacam ini menodai integritas dari informasi keuangan dan dapat merugikan sekumpulan korban seperti para pemegang saham, investor, kreditor, karyawan, masyarakat dan sebagainya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kecurangan laporan keuangan adalah salah saji yang atau pengambaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu pemakaian para pemakai laporan keuangan.

2.4.2. Macam-Macam Kecurangan dalam Laporan Keuangan

Menurut Anis (2013), Kecurangan dalam Laporan keuangan dapat menyangkut tindakan yang disajikan berikut ini: (a) Manipulasi, pemalsuan atau perubahan catatan akuntansi. (b) Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan, (c) Salah penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

2.4.3. Faktor-Faktor Penyebab Kecurangan

Dalam teori cressey, terdapat tiga faktor mendasar yang menjadi sebab perilakunya melakukan tindakan kecurangan, faktor-faktor tersebut diuraikan kedalam gambar segitia sebagai berikut:



Gambar 2.1

Cressey (1953) dalam Tiro (2014) menyimpulkan bahwa kecurangan secara umum mempunyai tiga sifat dalam teori ini yaitu “kesempatan (*Opportunity*), tekanan (*Pressure*), dan pembenaran (*Rationalization*)”.

1. Kesempatan (*Opportunity*)

Menurut Montgomery et al., (2002) dalam Kurniawati & Raharja (2012) kesempatan yaitu adanya peluang yang kemudian menyebabkan seseorang secara leluasa melakukan tindakan kecurangan, yang disebabkan oleh siste pengendalian internal yang lemah. Sistem pengendalian internal yang tidak baik tentu berdampak kepada organisasi serta dapat memberikan peluang atau kesempatan seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan.

2. Tekanan (*Preasure*)

Tekanan/motif yaitu insentif yang mendorong orang melakukan kecurangan karena tuntutan gaya hidup, ketidakberdayaan dalam soal keuangan, perilaku gambling, mencoba-coba untuk mengalahkan sistem dan

ketidakpuasan kerja (Salman, 2005). Montgomery et al., (2002) dalam Kurniawati & Raharja, (2012) mengatakan tekanan/motif ini sesungguhnya mempunyai dua bentuk yaitu nyata (*direct*) dan bentuk persepsi (*indirect*). Bentuk merupakan tekanan yang nyata disebabkan oleh kondisi kehidupan yang nyata yang dihadapi oleh pelaku yang mendorong untuk melakukan kecurangan. Kondisi tersebut dapat berupa kebiasaan sering berjudi, kecanduan obat terlarang, atau menghadapi persoalan keuangan.

3. Pembeneran (*Rationalization*)

Pembeneran merupakan unsur penting dalam terjadinya kecurangan, yang dimana pelaku mencari pembuktian dalam pembeneran atas tindakannya. Perilaku atau karakter seseorang merupakan awal penyebab seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan, misalnya: bahwa tindakannya untuk membahagiakan keluarga dan orang-orang yang dicintainya, perusahaan telah mendapat keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut. Sebagian dari mereka yang pada dasarnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk Bagi mereka yang umumnya tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk mewajarkan penipuan. Akan tetapi bagi mereka yang bermoral tinggi, mungkin tidak dapat menerima hal tersebut. Pelaku *Fraud* selalu mencari pembeneran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya (Molida, 2011).

2.5 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.1 Tinjauan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul penelitian	Variable penelitian	Hasil penelitian
1	Njonjie et al., (2014)	Pengaruh Kompetensi, Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara	Variable bebas: Sistem Pengendalian Internal Kompetensi Variable terikat: kecurangan Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kompetensi berpengaruh negative dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa. Sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan dalam pengelolaan keuangan desa
2	Wirakusuma & Setiawan (2019)	Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi dan Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi	Variable bebas: Pengendalian internal, kompetensi Variable terikat: kecenderungan kecurangan akuntansi	Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa hasil analisis data menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kompetensi berpengaruh negatif pada kecenderungan kecurangan akuntansi.
3	Eliza & Sekolah (2015)	Pengaruh Moralitas individu & Pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi	Variable bebas : pengendalian internal Variable terikat: kecenderungan kecurangan akuntansi	Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kecenderungan kecurangan akuntansi SKPD kota Padang. Pengaruh ini bersifat

		Empiris Pada SKPD di Kota Padang)		negatif yang artinya semakin efektif sistem Pengendalian Intern maka Tingkat Kenderungan Kecurangan Akutansi semakin berkurang.
4	Tiro, (2014)	Pengendalian internal & Kompensasi terhadap Kecendrungan Kecurangan (<i>Fraud</i>) di Kota Palopo	Variabel Bebas: Pengendalian internal Variabel Terikat: Kecendrungan Kecurangan (<i>Fraud</i>)	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal dan kompensasi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan
5	Haikal, (2017)	Pengaruh kompetensi, indenpendensi, dan skeptisme profesional auditor terhadap pendeteksian <i>Fraud</i>	Variabel bebas : Kompetensi auditor Variable terikat: Pendeteksian <i>Fraud</i>	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendeteksian <i>Fraud</i>
6	Adelin, (2013)	Pengaruh pengendalian iintenal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi studi pada bumh di kota padang	Variable terikat: Pengendalian Internal Variabel Bebas: Kecendrungan kecurangan Akuntansi	keefektifan pengendalian internal berpengaruh signifikan negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
7	Muna & Harris (2018)	Pengaruh pengendalian internal dan asimetri Informasi terhadap kecenderungan	Variable terikat: Pengendalian Internal Variabel Bebas: Kecendrungan kecurangan	Analisis penelitian dengan menggunakan multiple regression menunjukkan bahwa keefektifan pengendalian internal berpengaruh negatif

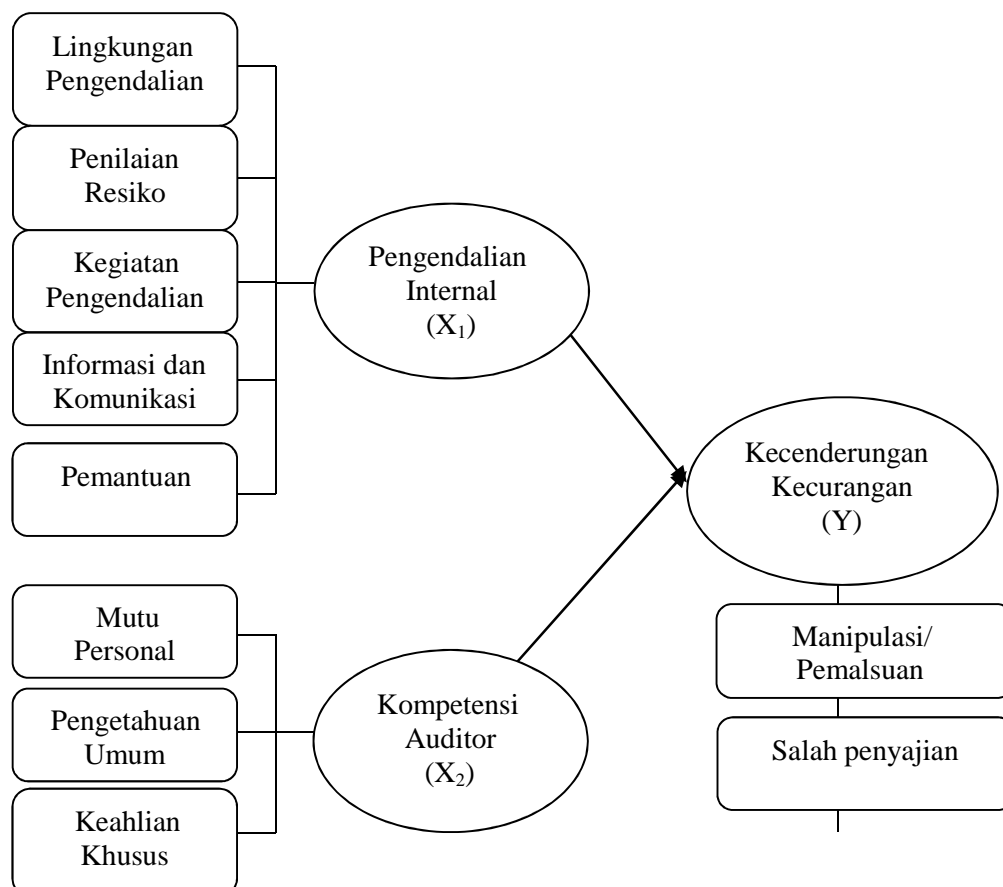
		kecurangan akuntansi	Akuntansi	terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi
8.	Sulaiman & Zulkarnaini, (2016)	Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan terhadap kecurangan akuntansi (studi pada pemerintah kota lhokseumawe	Variable bebas: pengendalian internal Variable terikat: kecurangan akuntansi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal terhadap aturan akuntansi berdampak negatif dan signifikan secara parsial pada kecurangan akuntansi
9.	Widyaningsih, (2015)	Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap Kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah	Variable bebas: system pengendalian internal Variable terikat: kecurangan laporan keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lingkungan, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi dan pemantauan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kecurangan dalam laporan keuangan pemerintah daerah
10.	Siregar & Hamdani, (2018)	Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Kompetensi Terhadap Fraud	Variable bebas: Pengendalian internal, kompetensi Variable terikat: kecendrungan kecurangan akuntansi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap fraud, sedangkan kompetensi tidak berpengaruh terhadap fraud.

11.	(Spatacean, 2012)	Addressing Fraud Risk by Testing the Effectiveness of Internal Control over Financial Reporting – Case of Romanian Financial Investment Companies	<p>bebas : Efektivitas Pengendalian Internal dan Resiko Peipuan</p> <p>Variabel terikat : Pelaporan keuangan</p>	<p>penelitian menunjukkan hasil bahwa peningkatan efektivitas pengendalian internal menghasilkan pengurangan risiko penipuan yang melibatkan aset keuangan. Penelitian ini juga mengidentifikasi titik-titik kelemahan signifikan dalam rantai kontrol internal terkait dengan aset keuangan, yang mampu meningkatkan risiko penipuan dan secara implisit mengubah keandalan proses pelaporan keuangan</p>
12.	(Petra cu & Tieanu, 2014)	The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection	<p>Variabel bebas : Internal audit</p> <p>Variabel terikat : Pencegahan dan pendeteksian penipuan</p>	<p>Artikel ini bertujuan untuk tidak hanya menjelaskan secara singkat peran audit internal dalam mendeteksi kemungkinan penipuan, tetapi juga untuk menyoroti pentingnya dalam mencegah komisi penipuan di entitas ekonomi mana pun. Selain itu, analisis ini bermaksud untuk secara khusus menunjukkan keuntungan yang dapat ditawarkan oleh audit internal kepada manajemen entitas</p>

				ekonomi dan mitranya, dan juga kepada masyarakat secara keseluruhan.
--	--	--	--	--

2.6 Kerangka Konseptual

Berdasarkan uraian diatas peneliti mengidentifikasi tiga variable yaitu pengendalian internal(X_1), Kompetensi Auditor(X_2), dan Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan(Y). Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.7 Pengembangan Hipotesis Penelitian

2.7.1 Pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan

Sistem pengendalian internal merupakan proses yang dijalankan untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, dan efektivitas dan efisiensi operasi (Tunggal, 2011:3). Sistem pengendalian internal yang rendah dan kepatuhan karyawan terhadap pengendalian internal yang juga rendah dapat menjadi pemicu terjadinya kecurangan (Fraud) di sektor pemerintahan.

Pengendalian internal diharapkan mampu mengurangi adanya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh manajemen. Manajemen cenderung melakukan tindakan menyimpang untuk memaksimalkan keuntungan pribadi. Salah satu contoh tindakan menyimpang yaitu kecenderungan melakukan kecurangan akuntansi. Kecenderungan kecurangan dapat terjadi apabila ada peluang untuk melakukan hal tersebut. Peluang yang besar membuat kecenderungan kecurangan akuntansi lebih sering terjadi. Peluang tersebut dapat dikurangi dengan sistem pengendalian internal yang baik. Pengendalian internal yang baik dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecenderungan kecurangan akuntansi.. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Wilopo (2006), Pristiyanti (2012), Najahningrum (2013), Adelin dan Fauzihardani (2013) yang melihat pengaruh pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan (Fraud). Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa semakin efektif pengendalian internal maka semakin kecil kecenderungan terjadinya kecurangan.

H₁ : Terdapat Pengaruh Pengendalian Internal terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan

2.7.2 Kompetensi Auditor terhadap kecenderungan kecurangan

Kompetensi Auditor adalah suatu pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan seorang auditor internal yang diperlukan untuk melakukan audit secara objektif, cermat dan seksama. Seorang auditor memerlukan kompetensi agar dapat mendeteksi dengan cepat dan tepat ada atau tidaknya kecurangan pada laporan keuangan suatu perusahaan. Sehingga seorang auditor yang memiliki kompetensi yang tinggi, maka akan dapat membantu auditor untuk mendeteksi kecurangan, hal ini didukung oleh penelitian Simanjuntak, (2012) yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh terhadap fraud , senada dengan penelitian yang dilakukan Wirakusuma & Setiawan, (2019), dan (Haikal, 2017) yang menyatakan sebaik baik kompetensi auditor maka fraud dapat dicegah.

H₂ : Terdapat pengaruh signifikan Kompetensi Auditor terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode survey, yaitu penelitian ini berkaitan dengan angka-angka dan dapat diukur untuk melihat apakah variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan data yang ada dan disertai dengan suatu analisa atau gambaran mengenai situasi dan kejadian yang ada.

3.2. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara langsung dan lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah Kantor Inspektorat Luwu Raya, dengan waktu yang digunakan dalam penelitian ini adalah Juni-Juli 2020

3.3. Populasi dan Sampel

Sugiyono (2014:80) mengemukakan bahwa “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah internal auditor yang bekerja pada Kantor Inspektorat se-Luwu Raya yang berjumlah 84 auditor, terdiri dari Kabupaten Luwu sebanyak 10 auditor, Kota Palopo 16 auditor, Kabupaten Luwu Utara sebanyak 33 auditor dan Kabupaten Luwu Timur 25 auditor.

Sampel menurut (Sugiyono, 2014:81) adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode sampel yang digunakan

adalah *Puposive Sampling*, sehingga jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 84 auditor, dengan kriteria :

- 1). Memiliki Pengalaman Kerja sebagai 1 tahun sebagai auditor
- 2). Memiliki pengetahuan cara mereview system pengendalian internal dan laporan keuangan
- 3). Auditor memiliki pendidikan Minimal Strata 1(S1)

3.4.Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2014:3). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data kuantitatif adalah jumlah responden yang menjawab kuesioner.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari jawaban responden dengan menggunakan metode survey serta menggunakan pernyataan dan pertanyaan guna untuk mendapatkan informasi dari responden.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, tehnik pengumpulan data yang digunakan berupa kuesioner. Kuesioner adalah suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan/pernyataan kepada responden dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut (Husein Umar, 2011:49). Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara mengantar langsung kuesioner ke alamat kantor tempat bekerja para auditor Internal. Setiap auditor internal

diberikan waktu pengembalian beberapa minggu terhitung sejak kuesioner diterima oleh responden. Pengembaliannya juga diambil langsung sesuai dengan janji yang disepakati dengan responden.

Kuesioner tersebut berisi pertanyaan untuk mendapatkan informasi tentang pengendalian internal dan kompetensi auditor terhadap kecenderungan kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah di kota Palopo. Petunjuk pengisian kuesioner dibuat dengan sederhana dan sejelas mungkin agar mempermudah responden dalam pengisian kuesioner.

3.6 Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

3.6.1 Variabel Bebas:

3.6.1.1 Pengendalian Internal (X1)

Pengendalian internal adalah seluruh kegiatan dalam organisai/instansi pemerintah yang dimonitoring oleh inspektorat yang wajib diaplikasikan dalam rangka meberikan keyakinn yang memadai tentang pencapaian tujuan secara efesien dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang ditetapkan untk mencapai tujuan tertentu.. Menurut Anis (2013) Indikator Pengendalian Internal diukur berdasarkan:

- a. Lingkungan Pengendalian
- b. Penilaian Resiko
- c. Kegiatan Pengendalian
- d. Informasi dan Komunikasi

- e. Pemantauan

3.6.1.2 Kompetensi Auditor (X2)

Kompetensi auditor merupakan kemampuan yang harus dimiliki dalam diri seorang auditor inspektorat seluru raya guna untuk melakukan audit secara maksimal dan dapat mendeteksi kecurangan. Indikator Menurut Ika Sukriya (2014) Kompetensi auditor diukur berdasarkan:

- a. Mutu personal
- b. Pengetahuan Umum
- c. Keahlian Khusus

3.6.2 Variabel Terikat

3.6.2.1 Kecendrungan Kecurangan Laporan Keuangan (Y)

Kecurangan laporan keuangan adalah salah saji yang atau pengambaian jumlah dan pengungkapan yang disengaja dengan maksud menipu pemakai laporan keuangan. Menurut Anis (2013) Indikator Kecendrungan Kecurangan Laporan Keuangan diukur berdasarkan:

- a. Manipulasi, pemalsuan, atau perubahan catatan akuntansi atau dokumen pendukungnya yang menjadi sumber data bagi penyajian laporan keuangan.
- b. Representasi yang dalam atau penghilangan dari laporan keuangan, peristiwa, transaksi, atau informasi signifikan
- c. penerapan secara sengaja prinsip akuntansi yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

3.7 Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa Angket/kuesioner. Kuisoner berisi daftar pernyataan-pernyataan mengenai variabel independen (Pengendalian Internal, Kompetensi Auditor), variabel dependen (Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan), dengan menggunakan skala Likert untuk mengukur sikapnya. Skala Likert merupakan metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau ketidaksetujuannya terhadap subyek, obyek atau kejadian tertentu. Jawaban responden diukur dengan skala Likert 1 – 5.

3.8 Analisis Data

3.8.1 Analisis Deskriptif

Analisis Deskriptif adalah analisis yang dilakukan untuk menilai karakteristik dari sebuah data. Iqbal Hasan (2001) menjelaskan bahwa statistika deskriptif adalah bagian dari statistika yang mempelajari cara pengumpulan data dan penyajian data sehingga mudah dipahami. Statistika deskriptif hanya berhubungan dengan hal menguraikan atau memberikan keterangan-keterangan mengenai suatu data atau keadaan.

3.8.2 Uji Keabsahan Data

3.8.2.1 Uji Validitas

Uji Validitas adalah uji untuk melihat sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang akan diukur. Menurut Hengki Latan, (2013:46) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau validnya suatu kuesioner.

3.8.2.2 Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas adalah Uji untuk melihat apakah Variabel yang akan , Reliabelnya Suatu Kuesiner ketika kuesioner tersebut telah diuji makan menghasilkan hasil yang sama. Menurut Sugiono (2012) uji reliabilitas adalah sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama.

3.8.3 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui berapa banyak penyimpangan yang terjadi pada data yang di gunakan untuk penelitian. Untuk menguji penyimpangan tersebut menggunakan beberapa asumsi yaitu: uji normalitas, multikolinearitas dan heteroskedastisitas.

3.8.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas adalah uji yang di gunakan untuk menguji apakah variabel bebas dan variabel terikat pada persamaan regresi terdistribusi normal atau tidak. Persamaan regresi dikatakan baik apabila variabel terikat dan variabel bebas terdistribusi mendekati normal atau normal sama sekali (Hengki Latan, 2013:56). Salah satu cara untuk melihat normalitas residual adalah dengan menggunakan uji Kolmogorov- Smimov dengan dasar pengambilan keputusan jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) $< 0,05$ maka data residual terdistribusi tidak normal. Hal ini berlaku sebaliknya, yaitu jika nilai Asymp. Sig (2-tailed) $> 0,05$ maka data residual terdistribusi normal (Hengki Latan, 2013:56).

3.8.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antara variabel independen. Model regresi yang benar harusnya tidak terdapat korelasi atau hubungan antara variabel independen. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan nilai VIF (Variance Inflation Factor). Nilai cut-off yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai tolerance $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$ (Hengki Latan, 2013:63).

3.8.3.3 Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut homoskedastisitas jikalau tidak tetap maka disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah model yang menghindari atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Hengki Latan, 2013:56)

3.8.4 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian diuji dengan menggunakan model regresi berganda. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dengan dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negative dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen. Seluruh pengujian dan analisis ini menggunakan bantuan SPSS (Statistical Program for Special Science). data ini biasanya berskala interval atau

rasio. Menurut Sugiyono (2016:63) persamaan regresi Uji regresi linear berganda yang ditetapkan adalah:

Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$

Keterangan :

- Y = Kecendrungan Kecuraangan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- a = Nilai Intercept (konstan)
- b = Koefisien Regresi
- X1 = Pengendalian Internal
- X2 = Kompetensi Auditor
- e = Error

3.8.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (Ghozali, 2011). Nilai Koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen (X) dalam menjelaskan variasi variabel dependen (Y) amat terbatas. Begitu pula sebaliknya, nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat.

3.8.4.2 Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk melihat hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat, apakah variabel independen (X) benar-benar berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) secara terpisah atau parsial (Ghozali, 2005).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Inspektorat Se-Luwu Raya

Luwu raya merupakan daerah yang dimekarkan menjadi empat daerah strategis yaitu, Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo istilah Luwu Raya telah umum digunakan masyarakat, disamping itu terdapat empat Kantor Inspektorat sebagai auditor internal pemerintah guna untuk melakukan audit, review, evaluasi dan pemantauan atau evaluasi lainnya.

4.1.1 Inspektorat Kota Palopo

Kota Palopo berdiri pada Tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kota Palopo dan Kabupaten Mamasa di provinsi Sulawesi Selatan. Dengan dibentuknya Kota Palopo menjadi didaerah otonom maka dibentuklah unit kerja sebagai pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Salah satu unit kerja yang dibentuk adalah unit kerja yang bertugas membantu walikota dalam melaksanakan pengawasan yaitu Inspektorat. Saat itu diberi nama Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA). Dalam perkembangannya, terjadi perubahan peraturan pemerintah tentang nomenklatur atau penamaan unit kerja pengawasan yaitu BAWASDA berubah menjadi Inspektorat Daerah. Terakhir, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Termasuk Perubahannya) tentang pemerintah daerah dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang organisasi perangkat daerah, ditetapkan menjadi Inspektorat. Dalam beberapa kurun waktu sejak dibentuknya, Inspektur sebagai pimpinan Inspektorat telah beberapa kali berganti yaitu yang pertama Drs.

H. Hasyim Muhammad (Kepala Bawasda 2002-2003), kedua Drs. H Bachtiar (Kepala Bawasda/Inspektur 2003-2011), Ketiga Drs. H. Darmo Junaid (Inspektur 2011-2014, Keempat Jamaluddin SH, MH (Inspektur 2014-2016) , Kelima H. Muhammad Samil Ilyas SE, MM (Inspektur 2016-2019), dan Keenam atau yang menjabat saat ini Drs. H. ASIR,MM (Inspektur 2020).

A. Visi dan Misi Inspektorat Kota Palopo

Visi

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana intansi pemerintah harus dibawah dan bekerja agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Dengan demikian, visi Inspektorat Kota Palopo yang harus bersinergi dengan visi Walikota yaitu: “Terwujudnya Palopo Sebagai Kota Maju, Inovatif dan berkelanjutan pada tahun 2023”.

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut adalah:

- 1) Maju, kota bergerak kearah yang positif, ditandai dengan ketersediaan sarana dan prasarana perkotaan yang lebih lengkap, lebih berkualitas, lebih bersitetika dan bermanfaat perekonomian dan kesejathtraan.
- 2) Inovatif, Kota Palopo selalu memberi solusi terhadap persoalan warga melalui pengelolaan pemerintah dan layanan publik dan efisien, efektif, modern dan mengarusutamakan riset, serta industri kreatif berkembang sebagai sector utama penggerak ekonomi.
- 3) Berkelanjutan, perkembangan kota dilakukan secara harmoni, sesuai daya dukung dan daya tampang lingkungan hidup, bersifat inklusif secara social dan memerhatikan kelestarian budaya lokal.

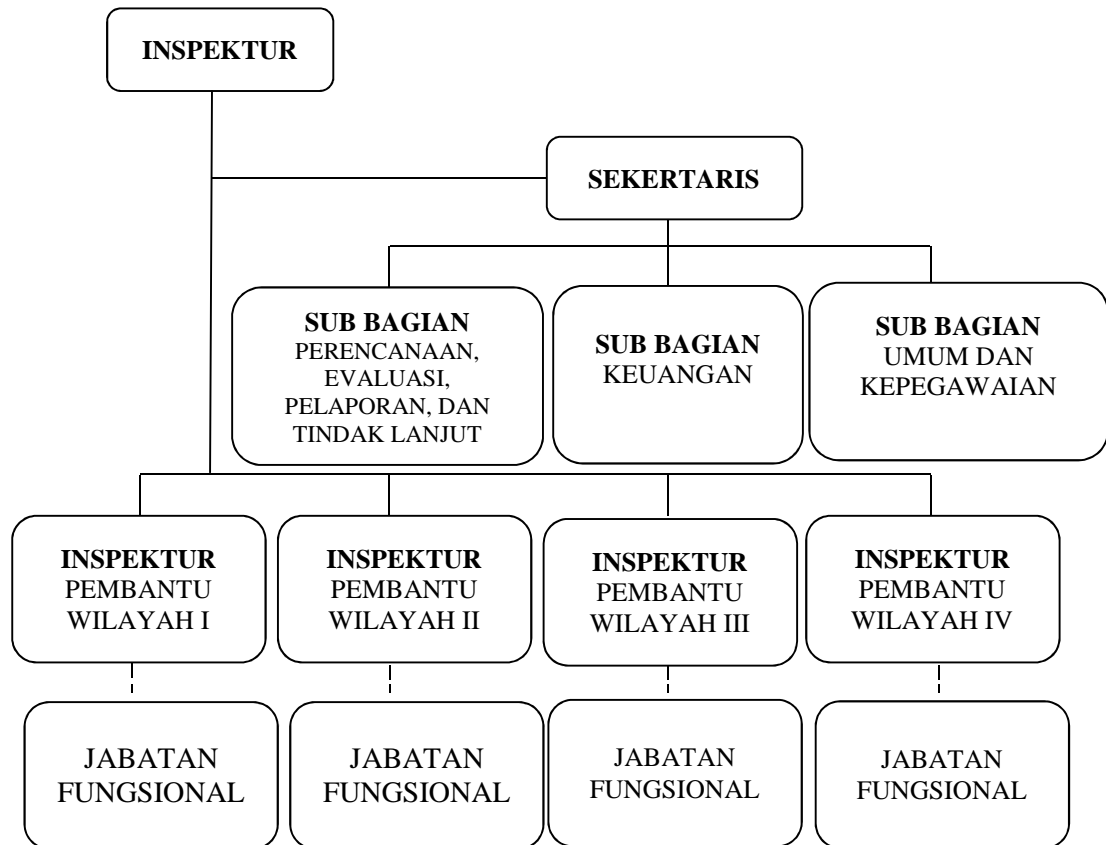
Misi

Misi kota Palopo 2018-2023 yaitu:

- 1) Melaksanakan layanan pendidikan, kesehatan serta jaminan dan perlindungan social untuk kelompok rentan.
- 2) Mewujudkan lingkungan yang layak huni melalui pengembangan infrastruktur perkotaan, penataan pemukiman, sanitasi dan ruang terbuka hijau.
- 3) Memodernisasi layanan public, meningkatkan kualitas aparatur dan tatakelola pemerintah, serta mendorong partisipasi public dalam pembangunan.
- 4) Mendorong Kewirausahaan berbasis jasa dan niaga melalui peningkatan keterampilan hidup, permodalan dan pendampingan bisnis. Mewujudkan iklim yang tertoleran terhadap pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif dan beicirikan nilai budaya Luwu.

a. Struktur Organisasi Inspektorat Kota Palopo

Adapun struktur organisasi inspektorat Kota Palopo adalah sebagai berikut:



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Kota Palopo

4.1.2 Inspektorat Kabupaten Luwu

a. Sejarah Singkat Kabupaten Luwu

Inpektorat Kabupaten Luwu berdiri sejak tahun 2005 pada saat Kabupaten Luwu berpisah dengan Kota Palopo dan kemudian Belopa menjadi Ibu Kota Kabupaten Luwu. Sebelum otonomi daerah, Inspektorat bernama Inspektorat Wilayah Kabupaten (ITWILKAB) kemudian setelah otonomi daerah tepatnya tahun 2005 berubah nama menjadi Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Pemerintah Daerah dan ditetapkanlah menjadi Inspektorat. Sejak berdirinya Inspektorat, Inspektur sebagai pimpinan Inspektorat telah beberapa kali berganti dan Inspektur Inspektorat kabupaten Luwu untuk periode saat ini yaitu Sakri, S,Pi, M.si

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Luwu

Visi

Visi pemerintah kabupaten luwu sebagaimana dituangkan dalam rencana strategis 2014-2020 adalah “terwujudnya Kabupaten Luwu yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing yang bernuansa religious”. Visi tersebut kemudian difokuskan pada bidang pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah menjadi Visi Inspektorat Daerah Kabupaten Luwu, yaitu “Terwujudnya pengawasan internal yang professional sebagai mitra kerja organisasi perangkat daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih.”

Inspektorat Daerah sebagai lembaga pengawasan intern pemerintah hendaknya mampu menjadi mitra kerja yang independen dan akuntabel bagi

organisasi perangkat daerah serta Inspektorat daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan hendaknya didukung oleh sumber daya manusia yang professional dan bermoral/beretika, sehingga mampu mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih serta bebas dari KKN.

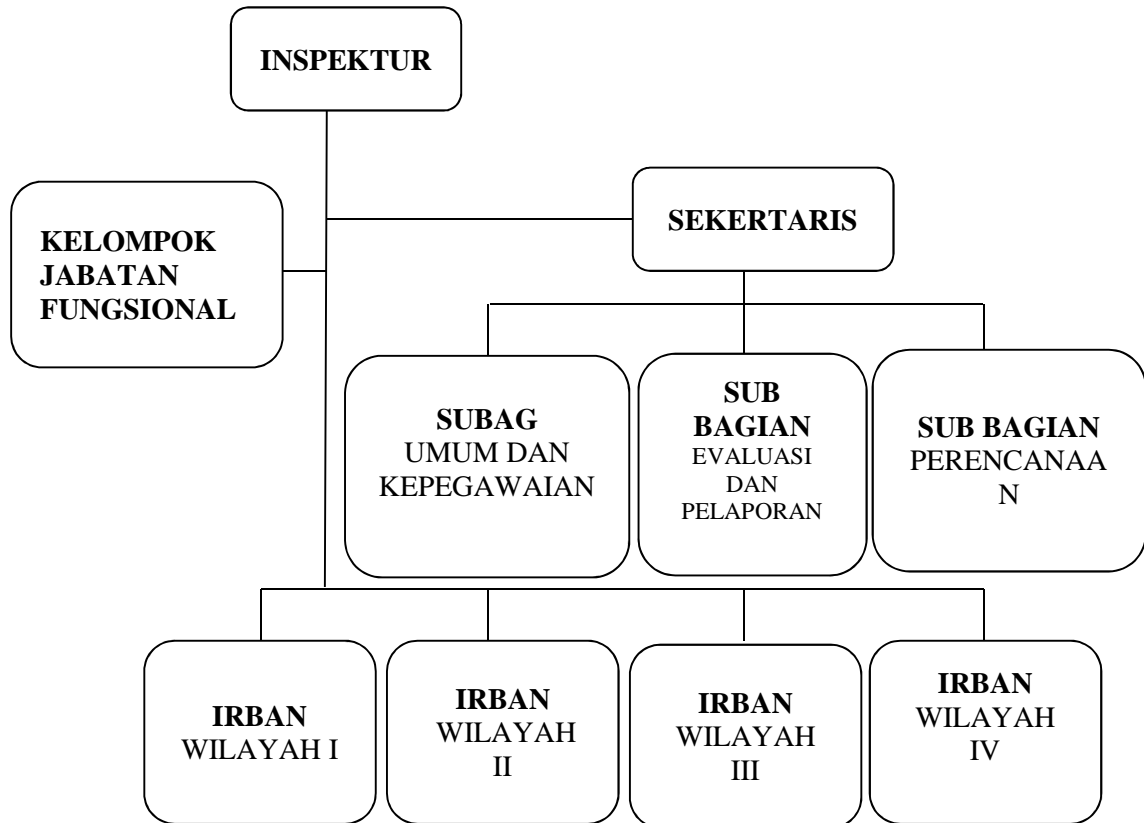
Misi

Upaya mewujudkan visi tersebut Inspektorat Daerah menjalankan misi:

- 1) Melakukan pengawasan internal sebagai mitra kerja organisasi perangkat daerah atas pelaksanaan urusan penyelenggaraan pemerintah di Daerah.
- 2) Mewujudkan aparat pengawasan yang professional dan akuntabel.
- 3) Untuk terselenggaranya pemerintah daerah yang baik dan bersih serta bebas dari KKN, pengawasan oleh inspektorat hendaknya mampu mendorong para pelaku penyelenggara pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja serta mematuhi prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- 4) Untuk mendapatkan hasil pengawasan yang obyektif, transparan, dan akuntabel perlu diterapkan system pengawasan yang mengutamakan prinsip indenpendensi dan etika moral.
- 5) Untuk meningkatkan produktivitas hasil pengawasa (kinerja pengawasan) perlu terus diupayakan pemberdayaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur pengawasan.

b. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Luwu

Adapaun struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Luwu adalah sebagai berikut:



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Luwu

4.1.3 Inspektorat Kabupaten Luwu Utara

a. Sejarah Singkat Inspektorat Luwu Utara

Inspektorat Kabupaten Luwu Utara berdiri sejak tahun 2020 pada saat Kabupaten Luwu Utara berpisah dengan Luwu Timur dan kemudian Masamba menjadi Ibu Kota Kabupaten Luwu Utara. Sebelum otonomi daerah, Inspektorat bernama Badan Pengawasan Daerah (BAWASDA) dan berdasarkan peraturan pemerintah Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah dan Lembaga Lain Kabupaten Luwu Utara ditetapkanlah menjadi Inspektorat. Sejak berdirinya Inspektorat, Inspektur sebagai pimpinan Inspektorat telah beberapa kali berganti dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Luwu Utara untuk periode saat ini yaitu Muhtar Jaya, SE, M.Si

b. Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara

Visi

Visi inspektorat kabupaten Luwu Utara yaitu “ Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dengan Pengawasan Profesional dan Berkualitas.”

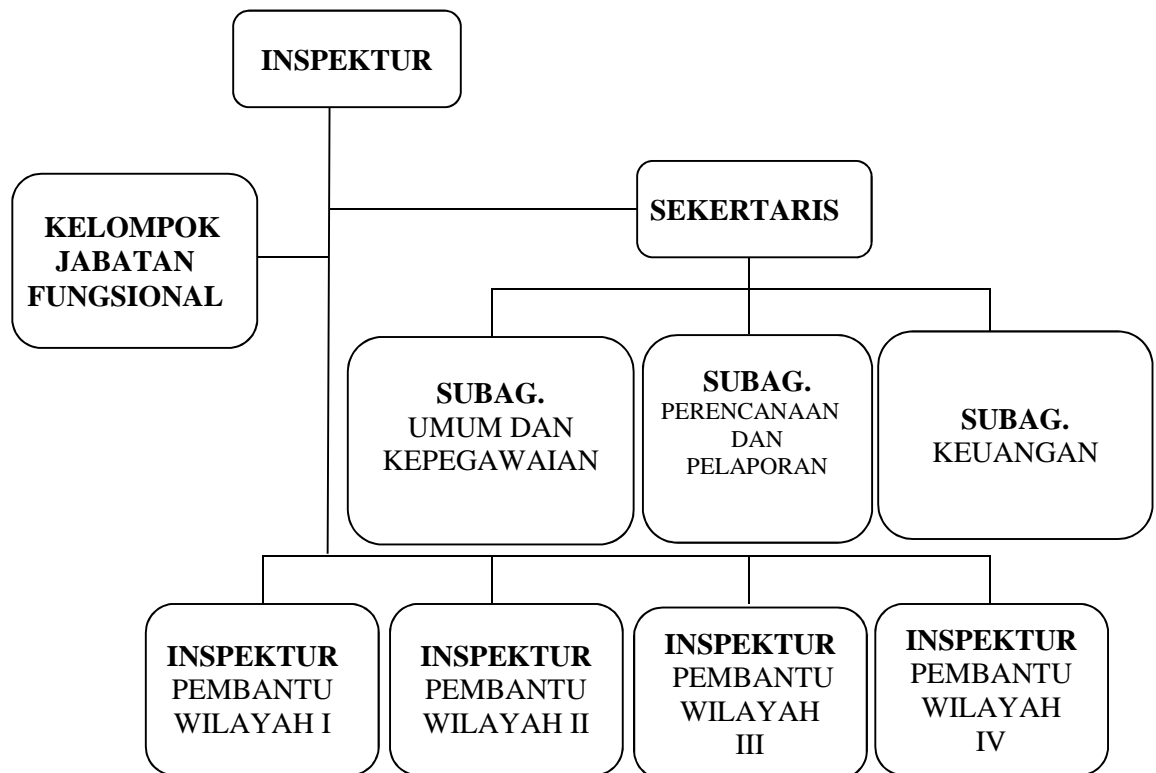
Misi

Misi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara yaitu:

- 1) Meningkatkan efektifitas pengawasan internal
- 2) Meningkatkan profesionalisme aparat pengawas internal pemerintah
- 3) Memantapkan peran Inspektorat dalam rangka peningkatan kinerja SKPD/Unit kerja lingkup Kabupaten Luwu Utara.

c. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara

Adapun struktur organisasi inspektorat Kabupaten Luwu Utara adalah sebagai berikut:



Gambar 4.3 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara

4.1.4 Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

a. Sejarah Singkat Inspektorat Luwu Timur

Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah sebagai Pengawasan Internal Pemerintah melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang bersih dan akuntabel dilingkungan pemerintah daerah. Untuk melihat kondisi semua aspek yang terkait dengan eksistensi inspektorat kabupaten luwu timur beserta perkembangannya beberapa tahun terakhir, terutama menyangkut pelayanan publik (public service) dan tanggung jawab (akuntabilitas), dalam upaya mewujudkan pengelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Inspektur Inspektorat Kabupaten Luwu Timur untuk periode saat ini yaitu Salam Latief, SM, M.Si

b. Visi dan Misi Inspektorat Luwu Timur

Visi

Visi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah terwujudnya Luwu Terkemukaka 2021.

Misi

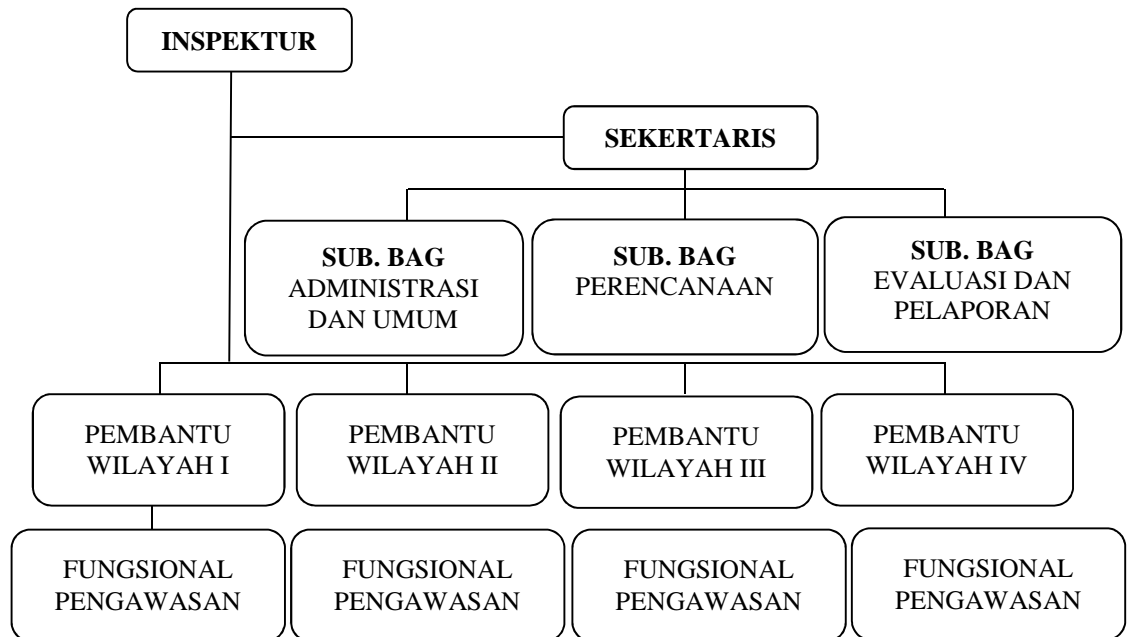
Misi Inspektorat kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut adalah:

- 1) Maju, adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur kualitas manusia yang tinggi, indikatornya adalah indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang tinggi.

- 2) Sejahtera, adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki masyarakat yang kemakmuran ekonominya tinggi, kesejahteraan sosialnya tinggi, kemiskinannya rendah serta ditopang oleh perikehidupan yang religius, indikatornya adalah PDRB/ perkapita dan angka kemiskinan daya beli masyarakat.
- 3) Mandiri, adalah kondisi dimana Kabupaten Luwu Timur memiliki daya saing yang tinggi. Daya saing tinggi ini ditandai dengan berfungsinya sejumlah infrastruktur yang mendorong berkembangnya iklim investasi yang atraktif, terpenuhinya fasilitas ekonomi yang memadai, terutama Bandar udara dan pelabuhan laut sebagai infrastruktur pokok dalam keterbukaan dengan dunia luar melalui pergerakan manusia dan barang, dan didukung oleh etos masyarakat yang tinggi untuk mandiri.

c. Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

Adapun struktur organisasi inspektorat Kabupaten Luwu Timur adalah sebagai berikut:



Gambar 4.4 Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur

4.2 Analisis Data

4.2.1 Deskripsi Data

Responden dalam penelitian ini adalah auditor internal yang berkeja pada Inspektorat di Luwu Raya meliputi Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur. Pada penelitian ini adalah, peneliti mendapatkan data melalui penyebaran kuesioner pada kantor Inspektorat di Luwu Raya sebanyak 89 eksemplar terdiri dari Luwu 10, Kota Palopo 16 dan yang kembali sebanyak 14, Luwu Utara 33 dan yang kembali 22, dan Luwu Timur 25 tingkat pengembalian sebesar 17 eksemplar. Jumlah kuesioner yang diisi dan dapat digunakan sebanyak 65 eksemplar dan yang tidak diisi sebanyak 19, atau tingkat

pengembalian data sebanyak 77,3 persen, adapun rincian dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1 Data Sampel Penelitian

No	Keterangan	Jumlah Kuesioner	Presentase
1	Distribusi Kuesioner	84	100%
2	Kuesioner Tidak Kembali	-	-
3	Kuesioner Cacat/Tidak Diisi	19	22,6%
4	Kuesioner yang dapat diolah	65	77,3%

Sumber: data primer diolah 2020

Tabel 4.2 Data Tingkat Jawaban Responden

Variabel	Frekuensi					Total
	SS	S	N	TS	STS	
Pengendalian Internal	27	32	6	0	0	65
Kompetensi	18	44	3	0	0	
Kecenderungan Kecurangan	23	41	1	0	0	

Sumber: data primer diolah 2020

Berdasarkan table 4.2 frekuensi jawaban responden pada dari 65 responden untuk variabel pengendalian internal yang menjawab “Sangat Setuju (SS)” sebanyak 27 orang, “Setuju (S)” sebanyak 32 orang, “Netral (N)” sebanyak 6 orang, “Tidak Setuju (TS)” sebanyak 0, “Sangat Tidak Setuju (STS)” sebanyak 0. Maka jawaban responden untuk variabel pengendalian internal rata-rata menjawab setuju. Untuk variabel Kompetensi auditor yang menjawab “Sangat Setuju (SS)” sebanyak 18 orang, “Setuju (S)” sebanyak 44 orang, “Netral (N)” sebanyak 3 orang, “Tidak Setuju (TS)” sebanyak 0, “Sangat Tidak Setuju (STS)” sebanyak 0. Maka jawaban

responden untuk variabel kompetensi auditor rata-rata menjawab Setuju. Untuk variabel kecenderungan kecurangan yang menjawab “Sangat Setuju (SS)” sebanyak 23 orang, “Setuju (S)” sebanyak 41 orang, “Netral (N)” sebanyak 1 orang, “Tidak Setuju (TS)” sebanyak 0, “Sangat Tidak Setuju (STS)” sebanyak 0. Maka jawaban responden untuk variabel kecenderungan kecurangan rata-rata menjawab Setuju.

4.2.2 Karakteristik Profil Responden

Sebanyak 65 auditor internal yang bekerja dikantor inspektorat Luwu Raya (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur) Berikut adalah deskripsi mengenai identitas responden penelitian yang terdiri dari jenis kelamin, usia, masa bekerja.

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.3 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Presentase
1	Laki-laki	33	50,8%
2	Perempuan	32	49,2%
3	Jumlah	65	100%

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2020

Berdasarkan table 4.2 diatas, bahwa sebanyak 33 orang atau 50,8% adalah responden laki-laki dan 32 orang atau 49,2% responden berjenis kelamin perempuan.

2. Deskripsi Berdasarkan Pendidikan Terakhir Responden

Tabel 4.4 Hasil Uji Deskripsi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah responden	Persentase
1	S1	55	84,6%
2	S2	10	15,4%
	Jumlah	65	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan table 4.3 diatas, memperlihatkan bahwa persentase yang paling besar yaitu 84,6% adalah responden yang tingkat pendidikan Starata (S1), dan yang terendah 15,4% responden yang tingkat pendidikan Starata 2 (S2). Hasil ini menunjukkan hampir sebagian besar responden memiliki tingkat pendidikan Starata (S1).

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4.5 Hasil Uji Deksripsi Berdasarkan Tingkat Usia

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	31-41 Tahun	34	52,3%
2	42-52 Tahun	24	36,9%
3	>53 Tahun	7	10,8%
	Jumlah	65	100%

Sumber: Data primer diolah 2020

Berdasarkan table 4.4 diatas menunjukkan bahwa responden yang bekerja pada pada Inspektorat se-Luwu Raya mayoritas berumur 31-41 tahun sebesar 52.3% atau 34 orang. Selanjutnya yaitu berusia 42-52 tahun sebesar 36,9% atau 24 orang, sisanya yaitu berusia >53tahun sebesar 10,8% atau 7 orang.

4. Deskripsi Berdasarkan Masa Kerja Responden

Tabel 4.6 Hasil Uji Deskriptif Berdasarkan Masa Kerja

No	Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
1	1-5 Tahun	27	41,5%
2	5-10 Tahun	15	23,1%
3	>10 Tahun	23	35,4%
	Jumlah	65	100%

Sumber: Data Primer Diolah 2020

Berdasarkan table 4.5 diatas, masa kerja responden yang bekerja sebagai auditor pada Inspektorat se-Luwu Raya mayoritas bekerja 1>5 tahun atau 27 orang sebesar 41,5%, Selanjutnya yaitu berkerja >10tahun sebesar 35,4% atau 23 orang, sisanya yaitu bekerja 5>10 tahun sebesar 23,1% atau 15 orang.

4.3 Hasil Uji Instrumen Penelitian

4.3.1 Hasil uji validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesoner. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan Pearson Corelation, pedoman suatu model dikatakan valid jika tingkat signifkansinya dibawah 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari tiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Pengendalian Internal (PI), Kompetensi Auditor (KA), Kecendrungan Kecurangan(KK) dengan 65 responden

Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
1. (PI1)	.752**	0,000	Valid
2. (PI2)	.814**	0,000	Valid
3. (PI3)	.767**	0,000	Valid
4. (PI4)	.860**	0,000	Valid
5. (PI5)	.870**	0,000	Valid
6. (PI6)	.859**	0,000	Valid
7. (PI7)	.834**	0,000	Valid
8. (PI8)	.839**	0,000	Valid
9. (PI9)	.845**	0,000	Valid
10. (PI10)	.805**	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Tabel 4.6 Menunjukkan variabel Pengendalian Internal mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil 0,05.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Kompetensi Auditor

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
1. (KA1)	.525**	0,000	Valid
2. (KA2)	.589**	0,000	Valid
3. (KA3)	.534**	0,000	Valid
4. (KA4)	.699**	0,000	Valid
5. (KA5)	.689**	0,000	Valid

6. (KA6)	.768 ^{**}	0,000	Valid
7. (KA7)	.647 ^{**}	0,000	Valid
8. (KA8)	.715 ^{**}	0,000	Valid
9. (KA9)	.576 ^{**}	0,000	Valid
10. (KA10)	.591 ^{**}	0,000	Valid

Sumber: Data primer yang diolah 2020

Tabel 4.8 Menunjukkan variabel Kompetensi Auditor mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil 0,05.

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Kecenderungan Kecurangan

Nomor Butir Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig (2-Tailed)	Keterangan
1. (KK1)	.483 ^{**}	0,000	Valid
2. (KK2)	.528 ^{**}	0,000	Valid
3. (KK3)	.469 ^{**}	0,000	Valid
4. (KK4)	.494 ^{**}	0,000	Valid
5. (KK5)	.619 ^{**}	0,000	Valid
6. (KK6)	.602 ^{**}	0,000	Valid
7. (KK7)	.557 ^{**}	0,000	Valid
8. (KK8)	.528 ^{**}	0,000	Valid
9. (KK9)	.495 ^{**}	0,000	Valid
10. (KK10)	.485 ^{**}	0,000	Valid

Sumber: Data yang diolah 2020

Tabel 4.9 Menunjukkan Kecenderungan Kecurangan mempunyai kriteria valid untuk semua item pertanyaan dengan nilai signifikansi lebih kecil 0,05.

4.3.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi dari instrument penelitian, suatu instrument penelitian dapat dikatakan reliable nilai Cronbach Alpha diatas 0,6. Hasil analisis SPSS untuk uji reliabilitas terhadap instrumen pada tiga variabel yang terdapat pada kuesioner dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 4.10 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Pengendalian Internal (X1)	0,947	Reliabel
Kompetensi Auditor (X2)	0,832	Reliabel
Kecendrungan Kecurangan (Y)	0,707	Reliabel

Sumber: Data Primer yang diolah 2020

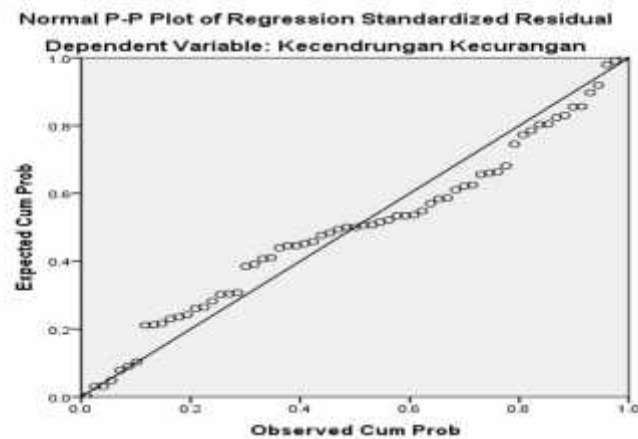
Tabel 4.10 Hasil analisis diatas menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha untuk semua pernyataan variabel pengendalian internal, kompetensi auditor, dan kecendrungan kecurangan (fraud) >0,6 yaitu masing-masing 0,947, 0,832, dan 0,707. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam kuisisioner ini reliabel karena mempunyai nilai cronbach's alphalebih besar dari 0,6. Hal ini menunjukkan bahwa setiap item pertanyaan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti bila pernyataan itu diajukan kembali akan diperoleh jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya.

4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, variabel dependen dan variabel independen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal dan mendekati normal.

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Grafik *P-Plot*



Gambar 4.5

Gambar 4.5 memperlihatkan penyebaran data yang berada disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, ini menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Namun pengujian normalitas data dengan hanya melihat grafik dapat meyakini atau tidak memberikan hasil akurat, sehingga perlu melakukan uji normalitas data dengan menggunakan statistic agar lebih meyakinkan. Untuk memastikan apakah data disepanjang garis diagonal berdistribusi normal, maka dilakukan uji Kolmogrov-Smirnov (1 Sample Ks) dengan melihat data residualnya apakah terdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka distribusi data adalah normal.

Tabel 4.11 One-Sample Kolomonogorof-smirnov

		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	65
	Std. Deviation	0E-7
	Absolute	2.58864753
Most Extreme Differences	Positive	.103
	Negative	-.099
Kolmogorov-Smirnov Z		.833
Asymp. Sig. (2-tailed)		.491

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan table diatas, hasil uji kolmogrov-Smirnov pada penelitian ini menunjukkan tingkat signifikasi residual sebesar 0,491 yang lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini dapat digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

4.3.3.2 Hasil Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi adanya problem multiko, maka dapat dilakukandengan melihat tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF) serta besaran korelasi antara variabel independen.

Tabel 4.12 Hasil Uji Multikolonieritas

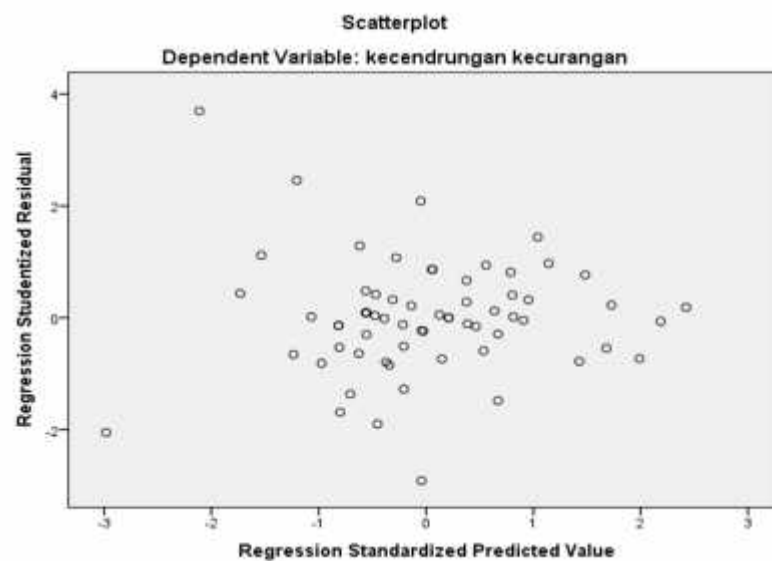
Model	Unstandardized		Standardized	Sig.	Collinearity		
	Coefficients		Coefficients		Statistics		
	B	Std. Error	Beta		Tolerance	VIF	
(Constant)	32.324	3.807		8.490	.000		
Pengendalian Internal	-.139	.057	-.273	-2.430	.018	.926	1.080
Kompetensi Auditor	.404	.086	.530	4.717	.000	.926	1.080

a. Dependent Variable: Kecendrungan Kecurangan

Pada tabel 4.12, bahwa nilai tolerance pada program variabel Pengendalian Internal sebesar 0,926, Kompetensi Auditor sebesar 0,926, dan semua nilai tolerance pada variabel X > 0,10. Dan melihat dari nilai VIF, semua variabel X menunjukkan nilai VIF < 10,00. Maka dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas.

4.3.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi, terjadi ketidaksamaan varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas.



Gambar 4.6

Berdasarkan gambar 4.6 Grafik scatterplot menunjukkan bahwa data tersebar diatas dan dibawah angka 0 (nol) pada sumbu Y dan tidak terdapat suatu pola yang jelas pada penyebaran data tersebut. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model persamaan regresi, sehingga model regresi layak

digunakan untuk memprediksi Fraud berdasarkan variabel yang mempengaruhinya, yaitu Pengendalian Internal, dan Kompetensi Auditor.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

Penelitian ini menggunakan empat variabel yang terdiri atas tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Untuk mengetahui pola hubungan antar variabel, maka akan diuji tiga hipotesis yang telah diajukan sebelumnya menggunakan metode analisis regresi linear berganda.

Tabel 4.13 Hasil Uji Hipotesis

Model	Coefficients ^a			T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		Std. Error	Beta		
Constant)	32.324	3.807		8.490	.000
Pengendalian internal	-.139	.057	-.273	-2.430	.018
kompetensi auditor	.404	.086	.530	4.717	.000

a. Dependent Variable: kecenderungan kecurangan
Sumber: data primer diolah 2020

Rumus yang didapatkan dari hasil pengujian: $+Y = 32.324 - 0,139 + 0,404 + e$

Nilai konstanta dengan koefisien regresi pada tabel 4.15 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Koefisien Konstanta sebesar 32.324 dengan nilai positif ini dapat diartikan bahwa Y (Fraud) akan bernilai 32.324. Pengendalian Internal dan Kompetensi Auditor masing-masing 0.
- Variabel Pengendalian Internal memiliki koefisien negatif sebesar $-0,139$. Nilai koefisien regresi negatif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel Pengendalian Internal dengan asumsi variabel lain tetap, maka akan menurunkan Fraud sebesar 0,139 atau 13,9%.

- c. Variabel Kompetensi Auditor memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 0,404. Nilai koefisien regresi positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu persen variabel Kompetensi auditor, dengan asumsi variabel lain tetap maka akan meningkatkan fraud sebesar, 0,404 atau 40,4%.

4.3.4.1 Uji-t (Parsial)

Uji ini digunakan untuk meneliti pengaruh apakah Pengendalian Internal, dan Kompetensi Auditor terhadap Fraud yang diuji pada tingkat signifikansi 0,05. Jika nilai probability t lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, sedangkan jika nilai probability t lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak (Ghazali, 2013).

Tabel 4.14 Hasil Uji T

Model	Coefficients ^a				T	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Beta		
		Std. Error				
(Constant)	32.324	3.807			8.490	.000
Pengendalian internal kompetensi auditor	-.139	.057	-.273		-2.430	.018
	.404	.086	.530		4.717	.000

a. Dependent Variable: kecendrungan kecurangan

- Uji Hipotesis 1: Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*)

Hasil uji hipotesis 1 dapat dilihat pada tabel 4.13, variabel Pengendalian Internal memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,018 yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t-hitung negatif 2,430. Sehingga variabel Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Fraud, dan dapat dikatakan bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa semakin efektif Pengendalian Internal yang diterima maka dapat menurunkan *fraud* (kecurangan)

2. Uji Hipotesis 2: Pengaruh Kompetensi Auditor terhadap Kecendrungan Kecurangan (*Fraud*).

Hasil uji hipotesis 2 dapat dilihat pada tabel 4.14, variabel Kompetensi auditor memiliki tingkat signifikan sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 dan memiliki nilai t-hitung Positif 4,717. Sehingga variabel Kompetensi berpengaruh terhadap Fraud dan dapat dikatakan bahwa H2 diterima, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat Kompetensi Auditor maka kemampuan auditor dalam mendeteksi Fraud akan semakin tinggi.

4.3.4.2. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.15 Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model		R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.526 ^a	.276	.253	2.63007	1.890

a. Predictors: (Constant), kompetensi auditor, Pengendalian internal

b. Dependent Variable: kecendrungan kecurangan

Hasil Analisis Uji Koefisien berganda tersebut dapat terlihat dari adjusted R Square sebesar 0,253 menunjukkan bahwa Kecendrungan Kecurangan dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu Pengendalian Internal dan Komepetensi Auditor sebesar 25,3% sisanya 74,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

1. Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud)

Koefesien regresi untuk hubungan Pengendalian Internal dan Kecendrungan Kecurangan (fraud) sebesar -0,139, ini berarti akan terjadi peningkatan fraud

sebesar -0,139 satuan jika tingkat pengendalian internal sebesar satu satuan dengan syarat variabel lain adalah konstan. Variabel Pengendalian Internal memiliki t-hitung sebesar -2,430 dan tingkat signifikansi sebesar $0,018 < 0,05$. Hal ini berarti koefisien variabel pengendalian internal signifikan pada level 5%. Hasil penelitian ini juga didukung oleh teori atribusi dimana teori ini menjelaskan bahwa kecurangan dapat dipengaruhi dari factor internal dan eksternal, pengendalian internal dalam hal ini dipengaruhi oleh factor eksternal yang menyatakan bahwa seseorang selalu mempunyai kesempatan (opportunity) untuk melakukan kecurangan, kesempatan yaitu kondisi atau situasi yang memungkinkan seseorang melakukan atau menutupi tindakan tidak jujur. Akan tetapi dengan memperkecil kesempatan dapat ditekan melalui system pengendalian internal, suatu system pengendalian internal telah dikatakan baik karena semua unsur yang membangun system terdiri atas lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian serta evaluasi dan pemantauan telah benar-benar diterapkan oleh semua instansi yang ada diluwa raya. Hasil penelitian ini konsisten (Adelin, 2013) bahwa pengendalian internal berpengaruh negative signifikan terhadap kecendrungan kecurangan (fraud), senada dengan penelitian (Widyaningsih, 2015) yang menunjukkan hasil bahwa pengendalian internal berpengaruh negative terhadap kecurangan, menyatakan semakin baik pengendalian internal yang diterapkan suatu instansi atau organisasi maka *fraud* dapat berkurang.

2. Pengaruh Kompetensi Auditor Terhadap Kecendrungan Kecurangan (Fraud)

Koefesien regresi untuk hubungan kompetensi auditor dan kecendrungan kecurangan (fraud) sebesar 0,404 , ini berarti akan terjadi penurunan fraud sebesar 0,404 satuan jika tingkat kompetensi auditor naik sebesar satu satuan dengan syarat variabel lain adalah konstan. Variabel kompetensi memiliki t-hitung sebesar 4,717 dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini berarti koefesien variabel kompetensi auditor signifikan pada level 5%. Pengaruh kompetensi auditor terhadap kecurangan dipengaruhi juga dipengaruhi oleh teori atribusi dimana teori atribusi menjelaskan perilaku seseorang dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal, dalam penelitian ini variabel kompetensi dipengaruhi oleh factor internal dalam diri auditor seperti pengetahuan, dan pemahamannya mengenai cara mendeteksi tingkat kecurangan dalam laporan keuangan kompetensi merupakan sesuatu yang ditunjukkan seorang auditor dalam tugas auditnya, ketika auditor dibekali kompetensi yang baik, maka kecurangan dapat dicegah, adapun hasil dalam penelitian ini kompetensi berpengaruh positif terhadap kecurangan.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Simanjuntak, (2012) yang menunjukkan bahwa kompetensi auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap fraud , senada dengan penelitian yang dilakukan Wirakusuma & Setiawan, (2019), dan (Haikal, 2017) yang menyatakan kompetensi auditor diperlukan untuk mengasah sensitivitas (kepekaannya) dalam menganalisis laporan keuangan yang diauditnya sehingga auditor dapat cepat mengetahui

apakah di dalam laporan keuangan tersebut, terdapat tindakan kecurangan atau tidak serta mampu mendeteksi trik-trik rekayasa yang dilakukan dalam melakukan kecurangan tersebut, dapat dikatakan semakin baik kompetensi yang dimiliki auditor, tingkat kecurangan dapat dicegah. Variabel kompetensi auditor telah dipandang sebagai variabel yang memengaruhi kecurangan, berdasarkan hasil temuan dilapangan dalam penelitian ini kompetensi auditor berpengaruh positif terhadap fraud, karena Hal ini menunjukkan kompetensi auditor sangat berpengaruh dalam tugas auditnya, dapat dikatakan semakin tinggi kompetensi auditor maka kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud akan semakin tinggi.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah dilakukan yaitu mengenai pengaruh pengendalian internal dan kompetensi auditor terhadap kecendrungan kecurangan (fraud) laporan keuangan pemerintah daerah pada kantor inspektorat di Luwu Raya (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur) maka disimpulkan bahwa:

1. Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kecendrungan Kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Inspektorat Luwu Raya (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik pengendalian internal dalam instansi/organisasi maka tingkat kecurangan dapat berkurang, karena dengan pengendalian internal yang efektif dapat menekan/ mencegah terjadinya kecurangan.
2. Kompetensi Auditor berpengaruh signifikan terhadap Kecendrungan Kecurangan laporan keuangan pemerintah daerah pada Kantor Inspektorat Luwu Raya (Kota Palopo, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, dan Kabupaten Luwu Timur). Hal ini menunjukkan kompetensi auditor sangat berpengaruh dalam tugas auditnya, dapat dikatakan semakin tinggi kompetensi auditor maka kemampuan auditor dalam mendeteksi fraud akan semakin tinggi.

5.2 Saran

1. Untuk penelitian selanjutnya agar menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi *Fraud*
2. Untuk Penelitian Selanjutnya agar mengumpulkan data dengan menggunakan metode selain kuesioner, misalnya dengan wawancara.

5.3 Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini diketahui, bahwa variabel yang digunakan hanya dapat menjelaskan sebesar 25,3% sisanya 75,7%, dijelaskan oleh factor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
2. Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner sebagai instrument penelitian, sehingga masih ada kelemahan yang yang diperoleh misalnya, responden asal-asalan dan tida jujur.

DAFTAR RUJUKAN

- Adelin, v. (2013). Pengaruh pengendalian internal, ketaatan aturan akuntansi, dan perilaku tidak etis terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi (Studi Empiris pada BUMN di Kota Padang). 1(2). 1-22
- Arens, Alvin A., Randal J. Elder & Mark S. Beasley. 2008. *Auditing & Assurance Services An Integrated Approach*. Jakarta : PT. Indeks
- Eliza, Y., & Sekolah. (2015). Pengaruh Moralitas Individu Dan Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Padang). *Jurnal Akuntansi*, 4(1), 86–100.
- Haikal, F. M. (2017). Pengaruh kompetensi, indenpendensi, dan skeptisme profesional auditpr terhadap pendeteksian *Fraud*. 1–14.
- Hasan, M. I. (2001). Pokok-pokok statistik 2 (statistik inferensif).
- Husein Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Henzani, M. D. (2013). Pengaruh Moralitas dan Motivasi Penyusun Laporan Keuangan SKPD Terhadap Kecenderungan Kecurangan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, 1, 1–21.
- Hengki Latan, S. T. (2016). *Aplikasi Analisis Multi Variatre dengan Program IMB SPSS (1st ed.)*. Kota Bandung: Alfabeta.
- Imam, G. (2011). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro*.
- IAI. 2001 Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) per Januari 2001. Jakarta: Salemba empat
- Kurniawati, E., & Raharja, S. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Financial Statement *Fraud* Dalam Perspektif *Fraud Triangle*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1–30.
- Lauw Tjun Tjun, Elyzabet Indrawati Marpaung, Santy Setiawan. 2017. “Pengaruh Kompetensi Dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit.” 42(1): 91–92.

- Mahmudi, (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Sistem Pengendalian Internal*. Edisi Keempat. Cetakan Keempat. UPP STIM YKPN
- Mulyadi. (2002). *Auditing*. Jakarta : Salemba Empat
- Muna, B. N., & Harris, L. (2018). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 35–44.
- Njonjie, P., Nangoi, G., Gamaliel, H., Studi, P., Akuntansi, M., Ekonomi, F., & Sam, U. (2014). Pengaruh Kompetensi , Sistem Pengendalian Internal dan Moralitas Aparatur Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 10(2), 79–88.
- Nugrahni, p. (2015). Pengaruh kompetensi dan profesionalisme auditor internal terhadap kualitas audit (studi empiris pada bumh dan bumd di Kota Yogyakarta. 151, 10–17.
- Nurhayati, N., & Muniarty, P. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Serta Dampaknya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Valid Jurnal Ilmiah*, 15(2), 125–135.
- Pintasari, D. (2015). Pengaruh kompetensi auditor, akuntabilitas dan bukti audit terhadap kualitas audit pada kap di yogyakarta. 151, 10–17.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara No. PER/M.PAN/03/2008 tetang Standar Audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, pasal 8 dan 11
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Petra cu, D., & Tieanu, A. (2014). The Role of Internal Audit in Fraud Prevention and Detection. *Procedia Economics and Finance*, 16(May), 489–497.
- Rahmadi, M & Adi, B & Fajar,H. (2006). *Audit Sektor Publik: Etika Profesi AuditorI*. Edisi Pertama. Cetakan pertama. LKPAP (Lembaga Pengkajian

Keuangan Publik dan Pemerintah, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan, Departemen Keuangan RI).

Robbins, Stephen and Judge, T (2014). *Perilaku Organisasi* (12th. ed) Jakarta Salemba Empat.

Sari, Besse Mardiah. 2016. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Inspektorat Sebagai Internal Auditor*.

Suartana, I. W. (2016). *Akuntansi keperilakuan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset

Siregar, M. I., & Hamdani, M. (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi , Keefektifan Sistem Pengendalian Internal , Budaya Organisasi , Dan Kompetensi Terhadap Fraud (Studi pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung). *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri*, . 9(1), 30-37

Spatacean, I.-O. (2012). Addressing Fraud Risk by Testing the Effectiveness of Internal Control over Financial Reporting – Case of Romanian Financial Investment Companies. *Procedia Economics and Finance*, 3(12), 230–235.

Sitinjak, J. R. T. Sugiarto, 2006, Lisrel. *Cetakan Pertama, Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta*.

Sulaiman, & Zulkarnaini. (2016). Pengaruh pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan ketaatan aturan terhadap kecurangan akuntansi (studi pada pemerintah kota lhokseumawe). *Jurnal akuntansi dan pembangunan*, 2(3), 102–116.

Sugiyono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tiro, A. A. A. (2014). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) Pada Pemerintah Kota Palopo. *Skripsi*, 1–106.

Tunggal, A. W. 2012. *Teori dan Kausu Internal Auditing*. Jakarta: Harvarindo

Trinanda, H. H. (2016). Kompetensi Terhadap Kemampuan Auditor Mendeteksi Kecurangan (Studi Empiris Pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Profita*, 3(1), 1–20.

Undang-Undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Utary Rachma Anis dan Muhammad Ikbal. (2013). *Audit Sektor Publik: Sistem Pengendalian Sektor Publik*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Interpena. Yogyakarta.

Wahyuni, N. (2017). Pengaruh Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern dan Moralitas Pegawai Terhadap Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi*, 4(2), 1–32.

Wayan Ramantha, N. (2013). Pengaruh Independensi, Keahlian Profesional Dan Pengalaman Kerja Auditor Internal Terhadap Efektivitas Struktur Pengendalian Internal Bank Perkreditan Rakyat Di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi*, 4(3), 439–450.

Widyaningsih, A. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap kecurangan laporan keuangan. 7(2), 1–14.

Wirakusuma, I. G. B., & Setiawan, P. E. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal, Kompetensi dan Locus Of Control Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1545. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p26>

Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi: Studi pada Perusahaan Publik dan BUMD di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang

<http://www/sindonews.com>.

<http://www/Liputan6.com>, Jakarta.

<http://www/tempo.com>